

## **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pada Kantor Distrik Merauke**

**Heremiana Eti <sup>1)</sup> Andri Irawan <sup>\*2)</sup> Nelly FML. Dumatubun <sup>3)</sup>**

<sup>1,3</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma, Indonesia

<sup>\*2</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Musamus, Indonesia

email: [andrirawan@unmus.ac.id](mailto:andrirawan@unmus.ac.id)

(Diterima September 2024; Disetujui September 2024; Dipublikasikan September 2024)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem informasi administrasi kependudukan (siak) pada Kantor Distrik Merauke berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu; kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan SIAK pada Kantor Distrik Merauke belum berjalan dengan baik dan belum terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Berdasarkan indikator yang digunakan yaitu pengolahan data penduduk, penyajian data penduduk, dan pembuatan biodata penduduk dapat dilihat pada indikator pengolahan data masih manual, pada indikator penyajian data masih belum akurat, cepat dan tepat sasaran dan pada indikator pembuatan biodata penduduk sudah baik dilihat dari segi pemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat namun pelayanan yang diberikan masih belum efektif dan efisien. Factor yang mendukung adalah adanya sarana dan prasarana yang cukup lengkap serta adanya anggaran pelaksanaan SIAK dari pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah masih rendahnya pengetahuan pegawai/staf terkait SIAK dan pengoperasian komputer, belum adanya operator SIAK, masyarakat belum memahami pentingnya memiliki data penduduk, serta belum adanya aturan yang mengatur tentang pelaksanaan SIAK pada Kantor Distrik Merauke.*

**Kata Kunci :** *Administrasi Kependudukan, SIAK, Pelayanan Kantor Distrik*

### **Abstract**

*This study aims to analyze the population administration information system (SIAK) application at the Merauke District Office based on Minister of Home Affairs Regulation No. 95 of 2019 concerning Population Administration Information Systems (SIAK). The method used in this study is a qualitative method using data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using interactive analysis which consisted of three stages namely; data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that in general the application of SIAK at the Merauke District Office has not gone well and an orderly population administration has not been realized. Based on the indicators used, namely population data processing, presenting population data, and making population biodata, it can be seen in the data processing indicators that are still manual, in the data presentation indicators that are still not accurate, fast and on target and in the indicators of making population biodata, it is good in terms of utilization felt by the community but the services provided are still not effective and efficient. Supporting factors are the existence of facilities and infrastructure that are quite complete and the existence of a SIAK implementation budget from the local government. While the inhibiting factors are the low knowledge of employees/staff regarding SIAK and computer operation, there is no SIAK operator, the community does not understand the importance of having population data, and there are no regulations governing the implementation of SIAK at the Merauke District Office.*

**Keyword :** *Population Administration, SIAK, District Office Services*



diterapkan di kecamatan/distrik. Seperti pada Distrik Merauke sudah mulai menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada bulan Juni tahun 2022. Dalam penerapannya terdapat beberapa komponen SIAK seperti; pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan.

Dengan adanya penerapan SIAK seharusnya pengelolaan data kependudukan sudah lebih mudah dan akuntabel, namun kenyataan dilapangan masih banyak permasalahan dalam pengelolaan data kependudukan yaitu Database kependudukan dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) belum tervalidasi dengan baik, masih kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi, sehingga pengolahan data masih bersifat manual, kurang optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti, kecepatan pelayanan, kedisiplinan petugas, dan kepastian jadwal pelayanan, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Di era yang serba keterhubungan ini penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sebuah keharusan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan data yang dikelola secara online, maka kelemahan data secara konvensional dapat ditekan. Beberapa manfaat SIAK antara lain dapat digunakan sebagai bahan formulasi dan evaluasi kebijakan, strategi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya yang bermanfaat bagi daerah. SIAK diperuntukkan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi, pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel dengan tujuan agar terlaksananya tertib administrasi dan juga dapat membantu petugas pemerintahan daerah khususnya Disdukcapil (Nugroho & Warsono, 2012). Sehingga tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Kantor Distrik Merauke serta factor yang mendukung dan menghambat.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell (2017) merupakan metode yang digunakan untuk menggali dan memahami sebuah makna yang dianggap sebagai masalah sosial oleh sejumlah individu/kelompok. Penelitian dilakukan di Kantor Distrik Merauke, khususnya dilakukan pengambilan data-data penelitian di wilayah Distrik Merauke, karena kantor Distrik Merauke sudah mulai menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan dan di Kantor Distrik tersebut juga peneliti menemukan sedikit kejanggalan dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini diantaranya adalah ; Kepala Distrik Merauke, Kepala Bagian Pemerintahan, Staf Bagian Pemerintahan dan Bidang Pelayanan, serta masyarakat pengguna layanan yang diambil secara purposive dan accidental. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dilakukan secara terus menerus yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Dimana dalam analisis data terdapat tiga aktifitas yaitu: *condensation data*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Distrik Merauke merupakan salah satu dari 22 Distrik yang berada di Kabupaten Merauke dan merupakan pusat Pemerintahan Kabupaten Merauke dengan jumlah penduduk yang sangat padat dan luas wilayah 2.113 km<sup>2</sup>. Distrik Merauke terdiri dari 11 Kelurahan dan 5 Kampung dengan jumlah Rukun Tetangga sebanyak 206 Rukun tetangga (RT) dan 47 RW (Rukun Warga) serta jumlah penduduk sebanyak 127.706 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 67.086 jiwa dan perempuan sebanyak 60.620 jiwa (<https://portal.merauke.go.id/>)

Kantor distrik Merauke mempunyai struktur organisasi berbentuk garis dimana wewenang dialirkan dari Kepala Distrik, Sekretaris, Kasub Bag Umum, Kasub Bag Program Dan Keuangan, Kasie Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kasie Tantrib, Kasie Pemerintahan Umum, Kasie Pembinaan dan Pengawasan (PMK), Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Kelurahan, serta Staf-Staf dari kepala bagian tersebut.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada bagian pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa tugas pokok dan fungsi aparat dari seksi pemerintahan yaitu ; (a) Melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan; (b) Melakukan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk; (c) Melakukan pelayanan permohonan surat pengantar pindah antar kabupaten/kota dan antar provinsi; (d) Melakukan perekaman data kependudukan di distrik; (e) Melakukan administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangannya; (f) Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **1. Pengolahan data penduduk**

Pengolahan data penduduk merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi terwujudnya tertib administrasi kependudukan. Pengolahan data kependudukan dalam penerapan SIAK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, menyediakan data dan informasi kependudukan daerah yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.

Proses pengolahan data kependudukan merupakan pendataan yang dilakukan oleh pegawai/staf melalui beberapa tahapan seperti staf administrasi kependudukan melakukan login pada server SIAK, input data penduduk, input data pendaftaran penduduk, admin melakukan input data verifikasi dan validasi, dan laporan data penduduk. Akan tetapi proses pengolahan data di Kantor Distrik ini ternyata masih dilakukan secara manual karena pegawai distrik belum terlalu paham menggunakan sistem SIAK. Proses atau tahapan dalam pengolahan data penduduk yaitu masyarakat membawa dokumen penduduk, kemudian dokumen tersebut diinput lalu diverifikasi/validasi kemudian hasil dari data yang sudah diverifikasi biasanya dalam bentuk laporan atau dokumen seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, Kematian Dan Surat Pindah. Seperti yang dikatakan oleh seksi pemerintahan dan pelayanan publik pada saat wawancara:

*“Proses pengolahan data kependudukan dapat dibuat melalui surat-surat lengkap yang dibawah oleh masyarakat sesuai dengan persyaratannya, lalu data tersebut bisa diproses sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa diselesaikan dengan cepat dan kami juga mengambil data penduduk dari RT/RW dan Kelurahan kemudian kami kelola menjadi sebuah informasi untuk warga disini, namun dalam pengolahan data masih manual hal ini karena*

*kami belum terlalu paham menggunakan sistem SIAK*". (Wawancara Sekretaris Distrik : 2024)

Hal serupa juga dikatakan oleh kepala Distrik Merauke pad saat wawancara dilakukan bahwa:

*"Proses atau tahapan dalam pengolahan data penduduk yaitu masyarakat membawa dokumen penduduk, kemudian dokumen tersebut diinput lalu diverifikasi/validasi kemudian hasil dari data yang sudah diverifikasi biasanya dalam bentuk laporan atau dokumen seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, Kematian Dan Surat Pindah"*. (Wawancara Kepala Distrik : 2024)

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pengolahan data penduduk dalam penerapan sistem informasi administrasi kependudukan pada Kantor Distrik Merauke belum teratur dengan baik, staf belum memahami proses atau tahapan pengolahan data penduduk, data yang dibuat belum akurat, dan pengolahan data masih manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

## 2. Penyajian data penduduk

Penyajian data penduduk merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan SIAK. Penyajian data penduduk perlu dilakukan dalam penerapan SIAK yaitu untuk meninjau perkembangan penduduk, memudahkan dalam membuat laporan, dan mudah di pahami serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. penyajian data penduduk sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat, kemudahan dalam membuat data penduduk dan untuk terwujudnya tujuan dari sistem informasi administrasi itu sendiri. Data penduduk yang sudah diolah perlu dilakukan penyajian dalam bentuk yang jelas dan baik.

Penyajian data administrasi kependudukan di Kantor Distrik Merauke dibuat dalam bentuk tabel, grafik dan demografi. Dengan tujuan untuk mengetahui jumlah penduduk Distrik Merauke, melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai media informasi terkait data kependudukan dan memudahkan pegawai dalam menjelaskan data kependudukan kepada masyarakat dan instansi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bentuk penyajian data penduduk pada Distrik Merauke terdiri dari tiga macam yaitu antara lain:

### a) Penyajian data dalam bentuk tabel

Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan data-data yang disusun dalam urutan baris dan kolom dengan tujuan agar lebih mudah dalam membuat biodata penduduk, mengetahui arus urbanisasi penduduk dan mengetahui jumlah penduduk pada Distrik Merauke, dapat dilihat seperti pada gambar berikut:



### 3. Pembuatan biodata penduduk

Pembuatan biodata penduduk merupakan salah satu aspek penting yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Pembuatan biodata penduduk terdiri dari pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan surat pindah penduduk.

Tujuan pembuatan biodata penduduk yaitu untuk membangun database kependudukan, untuk menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh Penduduk Indonesia dan untuk memperoleh kualitas data penduduk.

Manfaat pembuatan biodata penduduk yaitu untuk verifikasi atau memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh penduduk mengenai identitas dirinya dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program dari instansi terkait, sebagai acuan perencanaan pembangunan, dan membantu pemerintah dalam pengelompokan kondisi penduduk seperti tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran untuk menjalankan program pemberian bantuan bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa manfaat dari pembuatan biodata penduduk yaitu untuk kepentingan pendidikan anak, memperlancar perjalanan bisnis, memudahkan dalam mengurus bantuan dari pemerintah. Prosedur pembuatan biodata yaitu diantaranya pemohon mengajukan permohonan, petugas menerima permohonan, melakukan pengolahan data dan menerbitkan dokumen, dan petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon. Hal tersebut seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Distrik :

*“Prosedur pembuatan biodata penduduk yaitu masyarakat membawa surat pengantar dari kelurahan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan, kemudian kami memasukan data tersebut kedalam server komputer kami dan jika semua sudah dimasukkan dengan benar dan jika data yang kami buat sudah jadi maka kami akan memberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya”.* (Wawancara Sekretaris Distrik : 2024)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh kepala seksi pemerintahan dan pelayanan public yang mengatakan bahwa:

*“Dalam membuat biodata penduduk yang pertama masyarakat harus membawa surat pengantar dari Kelurahan dan surat-surat lainnya, lalu di verifikasi dan validasi data agar data yang dihasilkan merupakan data yang valid dan data tersebut diserahkan kemasyarakat yang meminta pembuatan biodata tersebut”.* (Wawancara Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan : 2024)

Prosedur pembuatan biodata penduduk pada kantor Distrik Merauke belum teratur dengan baik dikarenakan masih ada sebagian masyarakat kebingungan untuk masuk ruangan kepengurusan administrasi penduduk dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pembuatan biodata penduduk. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pembuatan biodata penduduk sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur oleh pemerintah. Namun masih ada masyarakat yang belum mengetahui persyaratan pembuatan biodata penduduk dan dokumen yang diperoleh masyarakat masih belum akurat, cepat dan tepat.





Hal tersebut serupa dengan yang terjadi dilapangan yaitu penyajian data penduduk pada Kantor Distrik Merauke perlu dilakukan karena merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Distrik Merauke dan untuk memberikan data yang sudah jadi kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu masyarakat butuh data tersebut. Penyajian data penduduk pada Kantor Distrik Merauke dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan demografi dengan tujuan agar lebih mudah mengetahui jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan untuk menjadikan media informasi terkait data kependudukan. Bentuk penyajian data penduduk memiliki keterkaitan satu sama lain seperti penyajian data berupa diagram dibuat berdasarkan tabel yang ada dan demografi dibuat berdasarkan tabel dan diagram lalu dibuat kesimpulan.

Penyajian data penduduk dalam bentuk tabel yaitu data penduduk dibuat berdasarkan kategorinya masing-masing seperti nama, jenis kelamin, NIK, tempat tanggal lahir, status, pekerjaan, pendidikan, dan jumlah penduduk. Penyajian data penduduk berupa diagram dilihat berdasarkan tabel jumlah penduduk kemudian dibuat diagram batang atau garis agar lebih mudah mengetahui pertumbuhan penduduk. Dan, penyajian data penduduk berupa demografi yaitu data disajikan berupa informasi atau power point untuk menjelaskan suatu keadaan terkait kondisi penduduk.

Akan tetapi, penyajian data tersebut belum dapat diakses oleh masyarakat secara umum baik melalui poster/ baliho ataupun website. Padahal kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi adalah sebuah hak yang harus dipenuhi oleh instansi penyelenggara layanan sebagai bukti transparansi public (Tjiptono : 2012).

c. Pembuatan biodata penduduk

Pembuatan biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk dengan tujuan untuk dikenal oleh orang lain dan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui tujuan dari pembuatan biodata penduduk yaitu untuk membangun database penduduk, menciptakan sistem pengenalan tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh Penduduk Indonesia. Namun dalam pembuatan biodata penduduk masih ditemukan NIK yang ganda hal ini dikarena warga melakukan pendaftaran yang berulang kali di berbagai daerah tanpa meminta surat pindah penduduk terlebih dahulu sehingga proses pembuatannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Manfaat pembuatan biodata penduduk yaitu untuk kepentingan pendidikan, mempermudah perjalanan, dan memperlancar dalam membuka usaha. Berdasarkan SOP Kantor Distrik Merauke bahwa lama waktu pemberian pelayanan kepada masyarakat kurang lebih dua dihitung dari hari dimana masyarakat mengurus sesuatu. Akan tetapi yang terjadi dilapangan yaitu pembuatan biodata penduduk masih membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu lebih dari dua hari bahkan sampai satu minggu kemudian baru masyarakat bisa mendapatkan apa yang diminta.

Prosedur pembuatan biodata penduduk pada Kantor Distrik Merauke yaitu:

- 1) Masyarakat membawa surat pengantar dari kelurahan.
- 2) Masyarakat membawa dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan.
- 3) Pegawai melakukan verifikasi dan validasi data.



## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), 20–37. <https://doi.org/10.35724/sjias.v7i01.967>
- Tjiptono, Fandy. 2012. *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Miles, Mathew B., Huberman, A. Michael., Saldana, Johnny. (2015). *Qualitative Data Analisis (A Methods Sourcebook)* Third Editions. SAGE Publications, Inc
- Nugroho, P. A., & Warsono, H. (2012). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(2).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Adminsitras Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No 06 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan.